

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR KEP- 53 /PK/2017
TENTANG
PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK
MASING-MASING PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2018

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas PMK Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138)
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.

MEMUTUSKAN:

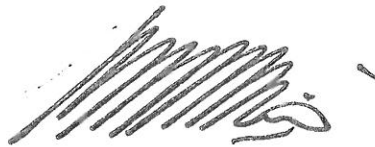
- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK MASING-MASING PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2018.
- PERTAMA : Menetapkan proporsi dan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Para Gubernur di Seluruh Indonesia; dan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2017

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,



BOEDIARSO TEGUH WIDODO

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN NOMOR KEP-33/PK/2017 TENTANG
PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK
ROKOK UNTUK MASING-MASING PROVINSI TAHUN
ANGGARAN 2018

**PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK
UNTUK MASING-MASING PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Nama Provinsi	Proporsi Jumlah Penduduk *	Estimasi Penyetoran Pajak Rokok ke Rekening Kas Umum Daerah 2018 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Provinsi Aceh	0,019732	286.639.103.495
2.	Provinsi Sumatera Utara	0,056387	819.111.200.460
3.	Provinsi Sumatera Barat	0,020943	304.228.105.150
4.	Provinsi Riau	0,022902	332.693.611.053
5.	Provinsi Kepulauan Riau	0,007173	104.204.415.886
6.	Provinsi Jambi	0,013285	192.982.492.536
7.	Provinsi Sumatera Selatan	0,031219	453.499.818.090
8.	Provinsi Bangka Belitung	0,005101	74.098.472.852
9.	Provinsi Bengkulu	0,007513	109.142.415.345
10.	Provinsi Lampung	0,036862	535.470.442.226
11.	Provinsi DKI Jakarta	0,039572	574.844.215.335
12.	Provinsi Jawa Barat	0,168641	2.449.770.234.989
13.	Provinsi Banten	0,039758	577.551.242.548
14.	Provinsi Jawa Tengah	0,136756	1.986.593.506.638
15.	Provinsi DI Yogyakarta	0,013809	200.596.757.535
16.	Provinsi Jawa Timur	0,152698	2.218.167.268.754
17.	Provinsi Kalimantan Barat	0,020544	298.436.288.481
18.	Provinsi Kalimantan Tengah	0,009583	139.213.535.942
19.	Provinsi Kalimantan Selatan	0,015050	218.627.659.242
20.	Provinsi Kalimantan Timur	0,013291	193.074.443.794
21.	Provinsi Kalimantan Utara	0,002396	34.811.088.310
22.	Provinsi Sulawesi Utara	0,010003	145.303.234.633
23.	Provinsi Gorontalo	0,004432	64.378.396.121
24.	Provinsi Sulawesi Tengah	0,011027	160.188.880.450
25.	Provinsi Sulawesi Selatan	0,036465	529.707.273.408
26.	Provinsi Sulawesi Barat	0,005882	85.449.307.634
27.	Provinsi Sulawesi Tenggara	0,009847	143.048.009.060
28.	Provinsi Bali	0,016198	235.304.602.328
29.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0,019979	290.224.312.497
30.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0,020524	298.141.632.819
31.	Provinsi Maluku	0,007057	102.516.640.268
32.	Provinsi Maluku Utara	0,004886	70.970.516.926
33.	Provinsi Papua	0,016247	236.011.453.282
34.	Provinsi Papua Barat	0,004236	61.539.421.914
	Jumlah	1,000000	14.526.540.000.000

Keterangan:

*) Proporsi ditentukan berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2017 yang dijadikan dasar perhitungan DAU TA 2018.

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,


BOEDIARSO TEGUH WIDODO